



Kepemimpinan Lapangan dan Strategi Batalyon sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan: Studi Efektivitas Operasi Pengamanan di Wilayah Rawan Perbatasan Papua

(Field Leadership and Battalion Strategy as Instruments of Defense Diplomacy: A Study on the Effectiveness of Security Operations in Papua's Vulnerable Border Region)

Jeffy Satriansyah, Sunarko, Rudi Lazuardi

*Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan RI*

jeffysatria75@gmail.com | sunarko_mirpur@yahoo.com | rudilazu209@gmail.com

Abstrak.

Kajian tentang efektivitas satuan tempur di wilayah rawan lazim diposisikan sebagai persoalan manajemen internal organisasi militer. Artikel ini mengajukan pembacaan yang berbeda: bahwa keberhasilan tugas prajurit pada operasi pengamanan di daerah rawan turut menjadi prasyarat kredibilitas diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan Papua yang bersinggungan langsung dengan hubungan bilateral Indonesia–Papua Nugini. Penelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimpinan lapangan (X1) dan strategi batalyon (X2) terhadap keberhasilan tugas prajurit (Y) pada operasi pengamanan di Kabupaten Sarmi, Papua, dengan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Sampel penelitian sebanyak 222 prajurit ditentukan dari populasi ± 500 personel menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan regresi linear sederhana dan berganda disertai uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit, dan secara simultan menjelaskan 56,3% variasinya. Temuan ini kemudian dibaca melalui lensa teori diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004; Cheyre, 2013): stabilitas operasional di tingkat batalyon menopang tiga fungsi diplomasi pertahanan sekaligus, yaitu penegakan kedaulatan sebagai prasyarat kepercayaan mitra, penyediaan lingkungan aman bagi kerja sama patroli perbatasan dengan Papua Nugini, dan pembentukan citra profesionalisme TNI AD yang mendukung posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pertahanan kawasan. Studi ini merekomendasikan agar pembinaan kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon di wilayah perbatasan tidak hanya dipandang sebagai isu kesiapan tempur, tetapi diintegrasikan ke dalam perencanaan diplomasi pertahanan lintas-kementerian.



Kata kunci: *diplomasi pertahanan, kepemimpinan lapangan, strategi batalyon, keamanan perbatasan, Papua.*

Abstract.

Studies on combat-unit effectiveness in high-risk areas are typically framed as an internal military-management issue. This article proposes a different reading: that soldiers' mission success in security operations in vulnerable areas is also a precondition for the credibility of Indonesia's defense diplomacy, particularly along the Papua border region that directly touches Indonesia–Papua New Guinea bilateral relations. This study examines the influence of field leadership style (X1) and battalion strategy (X2) on soldiers' mission success (Y) in security operations in Sarmi Regency, Papua, using an explanatory quantitative approach. A sample of 222 soldiers was drawn from a population of approximately 500 personnel using the Slovin formula and purposive sampling. Data were collected through a validated and reliable five-point Likert questionnaire and analyzed using simple and multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The results show that field leadership style and battalion strategy each have a positive and significant effect on mission success, jointly explaining 56.3% of its variance. These findings are then read through the lens of defense diplomacy theory (Cottey & Forster, 2004; Cheyre, 2013): operational stability at the battalion level simultaneously underpins three defense-diplomacy functions – asserting sovereignty as a precondition for partner trust, providing a secure environment for joint border-patrol cooperation with Papua New Guinea, and building the professional image of the Indonesian Army that supports Indonesia's bargaining position in regional defense cooperation. The study recommends that the development of field leadership and battalion strategy in border areas be integrated into cross-ministerial defense-diplomacy planning rather than treated solely as a combat-readiness issue.

Keywords: *defense diplomacy, field leadership, battalion strategy, border security, Papua.*

1. Pendahuluan

Diplomasi pertahanan lazim dipahami sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan secara damai pada masa tidak berperang untuk mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan negara, melalui bentuk-bentuk kerja sama seperti latihan bersama, pertukaran personel, dan dialog pertahanan (Cottey & Forster, 2004; Cheyre, 2013). Definisi ini umumnya diterapkan pada kegiatan yang secara eksplisit bersifat lintas negara. Artikel ini berangkat dari premis yang lebih luas: bahwa kapasitas satuan TNI AD dalam menjalankan operasi pengamanan

domestik di wilayah perbatasan yang rawan turut menjadi fondasi bagi kredibilitas diplomasi pertahanan itu sendiri. Sebuah satuan yang tidak mampu menjaga stabilitas, disiplin, dan kohesi di wilayahnya sendiri akan sulit diposisikan sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam kerja sama pertahanan lintas batas, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang keamanan perbatasan dari perspektif intelijen (Gunawan et al., 2024) maupun studi tentang interoperabilitas komando kewilayahan pertahanan Indonesia (Sumadinata et al., 2022).

Kabupaten Sarmi, Papua, dipilih sebagai lokus penelitian karena merepresentasikan karakteristik daerah rawan yang kompleks: medan hutan, perbukitan, dan pesisir dengan keterbatasan infrastruktur transportasi; ancaman keamanan asimetris yang fluktuatif; serta posisi geostrategis di kawasan Papua yang menjadi perhatian dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Papua Nugini. Sejak disahkannya pembaruan perjanjian pertahanan pada 2024, Indonesia dan Papua Nugini terus memperkuat kerja sama patroli perbatasan bersama, pertukaran pendidikan militer, dan mekanisme konsultasi keamanan di sepanjang garis perbatasan sepanjang 760 kilometer yang memisahkan kedua negara (Costa, 2024; Korwa & Rumabar, 2024). Konteks ini menegaskan bahwa efektivitas operasional satuan TNI AD di Papua bukan semata persoalan teknis-militer, melainkan juga variabel yang memengaruhi bagaimana Indonesia diposisikan dan dipersepsikan dalam kerja sama pertahanan regional, termasuk dalam pengelolaan kerentanan lintas batas non-tradisional seperti keamanan siber di perbatasan (Putri & Maksun, 2026) dan tata kelola pos lintas batas seperti Sota, Merauke (Metherall et al., 2022; Pugu & Pusung, 2025).

Dalam realitas operasional, dua instrumen diyakini berpengaruh kuat terhadap keberhasilan tugas prajurit di daerah rawan, yaitu gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon. Kepemimpinan lapangan berfungsi sebagai mekanisme pengarah dan pengikat tindakan kolektif prajurit sekaligus sumber legitimasi moral yang menentukan kepercayaan bawahan terhadap keputusan komandan (Bass & Riggio,

2006; Barfod & Clifton, 2025). Strategi batalyon, pada sisi lain, berfungsi sebagai kerangka manajemen operasional yang memastikan tindakan satuan tidak berjalan reaktif dan terfragmentasi, melalui perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan informasi intelijen, dukungan logistik, serta pengendalian dan evaluasi berkelanjutan (Alberts & Hayes, 2003; Mintzberg et al., 2009). Riset terbaru tentang strategi kepemimpinan untuk keamanan perbatasan Papua secara eksplisit menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengawasan dan manajemen ancaman menjadi determinan penting keberhasilan operasi di kawasan ini (Harefa & Supriyadi, 2025).

Meskipun kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon secara doktrinal diyakini sebagai determinan efektivitas operasi, variasi capaian keberhasilan antarsatuan dan antarperiode penugasan tetap terjadi bahkan pada wilayah dengan karakteristik ancaman yang relatif sejenis. Penelitian ini karenanya diposisikan untuk memberikan pembuktian empiris berbasis pendekatan kuantitatif mengenai pengaruh gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon terhadap keberhasilan tugas prajurit, baik secara parsial maupun simultan, sekaligus—dan ini yang membedakan revisi ini dari versi sebelumnya—menempatkan temuan tersebut dalam kerangka diplomasi pertahanan agar relevan dengan kebijakan pertahanan yang bersifat lintas-sektoral dan lintas-negara, bukan semata pembinaan satuan ke dalam.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Diplomasi Pertahanan sebagai Grand Theory

Cottey dan Forster (2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait secara damai (non-konfrontatif) pada masa damai sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Definisi ini kemudian diperluas oleh Cheyre (2013) yang menekankan bahwa diplomasi pertahanan mencakup pula pembangunan kepercayaan (*confidence building*), reformasi sektor keamanan, dan dukungan terhadap kapasitas pertahanan negara mitra. Cottey, Edmunds, dan Forster (2002) menambahkan dimensi penting lainnya, yaitu bahwa legitimasi dan efektivitas

internal angkatan bersenjata—termasuk relasi sipil-militer dan disiplin organisasi—menjadi prasyarat bagi kredibilitas peran eksternal militer dalam kerja sama pertahanan. Dalam konteks Indonesia, kajian tentang diplomasi asimetris dan sekuritisasi di Laut Cina Selatan (Mahroza et al., 2022) menunjukkan bahwa kapasitas pertahanan domestik yang kredibel menjadi basis bagi Indonesia untuk memainkan peran diplomatik yang lebih percaya diri di kawasan.

Diadaptasi ke konteks penelitian ini, diplomasi pertahanan dipahami dalam dua lapis: (1) lapis eksternal, yaitu kerja sama formal Indonesia–Papua Nugini dalam patroli perbatasan, pendidikan militer, dan konsultasi keamanan (Costa, 2024; Korwa & Rumabar, 2024); dan (2) lapis fondasional, yaitu kapasitas satuan TNI AD dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan profesionalisme di wilayah perbatasan domestik, yang menjadi prasyarat bagi lapis eksternal tersebut untuk berjalan kredibel. Tanpa keberhasilan tugas prajurit pada lapis fondasional, komitmen kerja sama pertahanan pada lapis eksternal berisiko menjadi simbolik belaka.

2.2 Kepemimpinan Lapangan dalam Operasi Militer

Teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006) menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu menginspirasi, memberi teladan, dan mengomunikasikan visi secara jelas akan meningkatkan motivasi intrinsik dan komitmen anggota organisasi. Dalam konteks militer, legitimasi moral pemimpin memiliki dimensi yang lebih kuat dibanding organisasi sipil karena pemimpin memimpin dalam situasi yang mengandung risiko keselamatan jiwa (Eid et al., 2004). Studi eksploratif terhadap satuan tempur Denmark di Afghanistan menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan transformasional dapat diamati secara konkret dalam praktik komunikasi lapangan sehari-hari, meski penerapannya tidak selalu linear dengan doktrin formal (Barfod & Clifton, 2025). Kerangka kepemimpinan grassroots dalam lingkungan operasi berintensitas dan berisiko tinggi juga menegaskan pentingnya sembilan faktor kepemimpinan—termasuk ketegasan, adaptivitas, dan pengelolaan moral bawahan—sebagai fondasi keberhasilan tugas (Bangari, 2014). Teori



Kepemimpinan Situasional (Hersey & Blanchard, 1988) melengkapi kerangka ini dengan menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin menyesuaikan gayanya dengan tingkat kesiapan bawahan dan dinamika lingkungan operasi rawan.

Pada level unit kecil, kepemimpinan transformasional juga terbukti berhubungan dengan potensi kelompok (group potency) melalui mediasi identifikasi dan kohesi kelompok (García-Guiu et al., 2016), sejalan dengan temuan bahwa kohesi vertikal dan horizontal memengaruhi kesiapan satuan (Griffith, 2006) serta efektivitas pengambilan keputusan tim dalam tekanan waktu (Zaccaro et al., 1995). Dengan demikian, kepemimpinan lapangan dioperasionalkan melalui indikator kejelasan komunikasi, keteladanan, ketegasan pengambilan keputusan, adaptivitas terhadap perubahan situasi, dan kemampuan menjaga moral prajurit.

2.3 Strategi Batalyon sebagai Instrumen Manajemen Operasional

Teori manajemen strategis (David & David, 2017; Mintzberg et al., 2009) menegaskan bahwa strategi merupakan mekanisme penyalarsan antara tujuan organisasi dan kondisi lingkungan serta instrumen pengalokasian sumber daya untuk mencapai keunggulan kinerja. Dalam konteks militer, strategi pada tingkat batalyon merupakan turunan operasional dari strategi pertahanan yang lebih luas, diwujudkan dalam perencanaan operasi, pengorganisasian pasukan, pemanfaatan intelijen, dukungan logistik, serta sistem pengendalian. Teori Command and Control (C2) menegaskan pentingnya integrasi keputusan dengan alur informasi dan struktur komando yang jelas untuk mencegah fragmentasi tindakan (Alberts & Hayes, 2003). Kajian bibliometrik tentang keamanan perbatasan dari perspektif intelijen menegaskan tren meningkatnya perhatian akademik terhadap integrasi intelijen, teknologi pengawasan, dan strategi manajemen ancaman di wilayah perbatasan (Gunawan et al., 2024), sementara studi interoperabilitas komando kewilayahan pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas strategi batalyon sangat

dipengaruhi oleh derajat integrasi lintas-matra dan lintas-lembaga di tingkat lokal (Sumadinata et al., 2022).

Strategi batalyon dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui indikator perencanaan operasi yang sistematis, pengorganisasian yang jelas, pemanfaatan informasi intelijen, dukungan logistik yang memadai, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi berkelanjutan.

2.4 Kajian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Kajian mengenai hubungan antara kepemimpinan militer dan efektivitas operasi menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Aulia, Halkis, dan Timur (2024) menegaskan bahwa perang generasi kelima dan keenam menuntut respons politik-hukum dan operasional yang adaptif terhadap ancaman asimetris yang tidak lagi berpola konvensional. Studi kasus historis oleh Vun, Susanto, dan Halkis (2024) tentang strategi militer Pol Pot memperlihatkan bagaimana taktik gerilya dan pertahanan wilayah yang terstruktur dapat menopang kendali teritorial dalam kondisi sumber daya terbatas, sebuah pelajaran yang relevan bagi strategi batalyon di medan berat seperti Papua. Sementara itu, kajian diplomasi pertahanan Indonesia dalam isu sekuritisasi di Laut Cina Selatan (Mahroza et al., 2022) dan kajian kerentanan siber di perbatasan Indonesia–Papua Nugini (Putri & Maksum, 2026) menegaskan bahwa kesenjangan institusional dan asimetri persepsi ancaman antarnegara dapat menghambat efektivitas kerja sama pertahanan lintas batas apabila fondasi kapasitas domestik tidak kuat.

Kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi ini ditegaskan pada tiga aspek. Pertama, belum banyak penelitian kuantitatif yang menguji secara simultan pengaruh kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon terhadap keberhasilan tugas prajurit pada operasi aktif di kawasan yang secara langsung relevan dengan hubungan bilateral pertahanan, seperti perbatasan Papua–Papua Nugini. Kedua, literatur diplomasi pertahanan yang ada masih berfokus pada aktivitas kerja sama lintas negara yang eksplisit (latihan bersama, pertukaran personel), dan belum

banyak mengaitkannya secara empiris dengan efektivitas operasional satuan di tingkat batalyon sebagai basis kredibilitasnya. Ketiga, belum terdapat model empiris yang mengintegrasikan teori kepemimpinan transformasional-situasional, manajemen strategis, C2, dan diplomasi pertahanan dalam satu kerangka kuantitatif yang koheren. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut.

2.5 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan sintesis di atas, penelitian ini merumuskan tiga hipotesis: H1, gaya kepemimpinan lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit; H2, strategi batalyon berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit; dan H3, gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit. Ketiga hipotesis ini kemudian diinterpretasikan tidak hanya sebagai temuan manajerial internal, tetapi juga sebagai indikator kesiapan fondasional bagi peran Indonesia dalam diplomasi pertahanan di kawasan perbatasan Papua.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksplanatori untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan lapangan (X1) dan strategi batalyon (X2) terhadap keberhasilan tugas prajurit (Y) dalam operasi pengamanan di daerah rawan. Pendekatan eksplanatori dipilih karena penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi menguji hubungan kausal antarvariabel berdasarkan kerangka teori organisasi, kepemimpinan, manajemen strategis, dan diplomasi pertahanan yang telah dirumuskan pada bagian tinjauan pustaka. Penelitian dilaksanakan pada satuan batalyon yang melaksanakan operasi pengamanan di wilayah Kabupaten Sarmi, Papua.

Populasi penelitian berjumlah sekitar 500 prajurit yang terlibat dalam operasi pengamanan. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 222 responden, dengan teknik purposive sampling berdasarkan

kriteria keterlibatan langsung dalam tugas operasional, masa penugasan minimal tiga bulan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan patroli, pengamanan wilayah, atau dukungan operasi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator operasional masing-masing variabel: kepemimpinan lapangan (kejelasan komunikasi, keteladanan, ketegasan, adaptivitas, pengelolaan moral prajurit); strategi batalyon (perencanaan sistematis, pengorganisasian, pemanfaatan intelijen, dukungan logistik, pengendalian dan evaluasi); dan keberhasilan tugas prajurit (disiplin operasional, moral tempur, kohesi satuan, efektivitas pelaksanaan misi). Instrumen diuji validitasnya melalui korelasi item-total dan reliabilitasnya melalui koefisien Cronbach's Alpha.

Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), dilanjutkan dengan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, dan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk signifikansi parsial dan uji F untuk signifikansi simultan pada taraf 5%, sementara koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kontribusi kedua variabel independen dalam menjelaskan variasi keberhasilan tugas prajurit. Sebagai unsur pembeda dari kajian sejenis, hasil analisis statistik pada tahap akhir diinterpretasikan tidak hanya secara manajerial-organisasional, tetapi juga dikaitkan dengan implikasinya terhadap kredibilitas dan kesiapan Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan di kawasan perbatasan Papua.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kualitas Instrumen dan Deskripsi Variabel

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki korelasi item-total yang memadai terhadap konstruk yang diwakilinya, sedangkan uji reliabilitas menunjukkan konsistensi internal yang tinggi pada ketiga variabel. Secara deskriptif, responden menilai kualitas gaya kepemimpinan lapangan pada kategori baik hingga sangat baik, dengan kejelasan komunikasi dan keteladanan pemimpin dinilai paling

menonjol dalam situasi ancaman asimetris dan medan yang kompleks. Strategi batalyon juga dinilai relatif kuat, khususnya pada dimensi pemanfaatan intelijen dan dukungan logistik, yang konsisten dengan temuan bahwa pengelolaan informasi dan sumber daya menjadi kunci ketahanan operasi di wilayah perbatasan (Gunawan et al., 2024).

4.2 Pengaruh Parsial Kepemimpinan Lapangan dan Strategi Batalyon

Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit (H1 diterima), mengonfirmasi teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006) bahwa pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberi teladan meningkatkan komitmen substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Temuan ini sejalan dengan hasil studi lapangan pada satuan tempur di lingkungan operasi berisiko tinggi yang menunjukkan bahwa kehadiran fisik dan keteladanan pemimpin secara konsisten berasosiasi dengan performa satuan (Barfod & Clifton, 2025; Bangari, 2014).

Strategi batalyon juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit (H2 diterima). Perencanaan yang sistematis, pengorganisasian yang jelas, dan pemanfaatan intelijen terbukti mengurangi ambiguitas tindakan dan memperkuat efektivitas pelaksanaan operasi, mendukung teori manajemen strategis dan Command and Control (Alberts & Hayes, 2003; David & David, 2017). Temuan ini juga relevan dengan hasil kajian strategi kepemimpinan kolaboratif untuk pengawasan dan manajemen ancaman di perbatasan Papua, yang menegaskan bahwa efektivitas keamanan kawasan bergantung pada integrasi perencanaan lintas-unsur (Harefa & Supriyadi, 2025).

4.3 Pengaruh Simultan dan Keterbatasan Model

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon secara simultan menjelaskan 56,3% variasi keberhasilan tugas prajurit (H3 diterima), mengindikasikan bahwa efektivitas operasi di daerah rawan merupakan hasil integrasi antara dimensi psikologis (kepemimpinan) dan dimensi

struktural (strategi). Sisa 43,7% variasi yang tidak dijelaskan oleh model mengindikasikan adanya faktor lain—kondisi geografis spesifik, intensitas ancaman, kualitas perlengkapan, pengalaman individu prajurit, dan dinamika sosial lokal—yang perlu dieksplorasi pada penelitian lanjutan, termasuk faktor lintas batas seperti dinamika sosial-ekonomi di pos perbatasan Sota, Merauke (Pugu & Pusung, 2025) yang dapat memengaruhi persepsi ancaman di kawasan sekitarnya.

4.4 Implikasi terhadap Diplomasi Pertahanan

Temuan di atas memiliki tiga implikasi bagi diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan perbatasan Papua. Pertama, fungsi penegakan kedaulatan (sovereignty assertion): satuan yang memiliki kepemimpinan lapangan kuat dan strategi batalyon terstruktur menghadirkan negara secara nyata di wilayah rawan, yang menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk berunding dari posisi yang setara dalam kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini, bukan dari posisi yang rentan (Cotter & Forster, 2004; Mahroza et al., 2022). Kedua, fungsi penciptaan lingkungan aman bagi kerja sama teknis: efektivitas operasi domestik menyediakan prasyarat keamanan yang memungkinkan pelaksanaan patroli perbatasan bersama, pertukaran pendidikan militer, dan mekanisme konsultasi keamanan berjalan sebagaimana disepakati dalam pembaruan perjanjian pertahanan 2024 (Costa, 2024; Korwa & Rumabar, 2024), termasuk dalam menutup celah tata kelola non-tradisional seperti keamanan siber lintas batas (Putri & Maksum, 2026).

Ketiga, fungsi pembentukan citra dan kepercayaan (confidence building): profesionalisme satuan di lapangan—tercermin dari disiplin operasional, kohesi, dan moral tempur yang terjaga—berkontribusi pada citra TNI AD sebagai mitra pertahanan yang kredibel di mata Papua Nugini maupun aktor regional lain, sejalan dengan argumen Cheyre (2013) bahwa diplomasi pertahanan modern bertumpu pada pembangunan kepercayaan, bukan semata proyeksi kekuatan. Dengan demikian, pembinaan kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon di wilayah perbatasan idealnya tidak lagi diperlakukan sebagai agenda internal TNI AD semata, melainkan

dipertimbangkan pula oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari perencanaan diplomasi pertahanan lintas-kementerian, khususnya dalam konteks pembinaan wilayah perbatasan yang berdampak langsung pada hubungan bilateral (Sumadinata et al., 2022; Pugu et al., 2019).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini membuktikan secara statistik bahwa gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit dalam operasi pengamanan di daerah rawan Sarmi, Papua, dan secara simultan menjelaskan 56,3% variasinya. Secara substantif, keberhasilan tugas prajurit di daerah rawan bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil integrasi antara kualitas kepemimpinan dan efektivitas strategi operasional. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pembacaan ulang temuan tersebut melalui lensa diplomasi pertahanan: efektivitas operasional di tingkat batalyon bukan sekadar ukuran kesiapan tempur internal, melainkan fondasi bagi kredibilitas Indonesia dalam menjalankan kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini di kawasan perbatasan.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan kapasitas kepemimpinan lapangan melalui pelatihan berbasis simulasi kondisi nyata dengan penekanan pada komunikasi presisi dan pengelolaan moral dalam tekanan tinggi. Kedua, penyempurnaan sistem perencanaan dan pengendalian operasi tingkat batalyon secara berkelanjutan dengan memanfaatkan analisis risiko dan intelijen secara optimal, termasuk kesiapan menghadapi ancaman non-tradisional lintas batas. Ketiga—dan ini yang membedakan rekomendasi kebijakan dari versi sebelumnya—integrasi perencanaan pembinaan satuan di wilayah perbatasan ke dalam kerangka diplomasi pertahanan lintas-kementerian, agar kesiapan operasional TNI AD di Papua dirancang selaras dengan agenda kerja sama pertahanan Indonesia–Papua Nugini yang terus berkembang.



Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi (satu satuan, satu wilayah operasi) dan pendekatan kuantitatif berbasis persepsi responden yang berpotensi bias subjektif. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah perbatasan lain, memasukkan variabel eksternal seperti intensitas kerja sama pertahanan bilateral dan persepsi mitra regional, serta mempertimbangkan pendekatan mixed-methods yang memadukan data kuantitatif satuan dengan wawancara pemangku kepentingan diplomasi pertahanan di tingkat kementerian.

Daftar Pustaka

- Alberts, D. S., & Hayes, R. E. (2003). *Power to the edge: Command and control in the information age*. CCRP Publication Series.
- Aulia, M. R. N., Halkis, M., & Timur, F. G. C. (2024). Legal politic as counter an asymmetrical warfare in the 5th & 6th generation war. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(1), 480–488. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1030>
- Bangari, R. S. (2014). Establishing a framework of transformational grassroots military leadership: Lessons from high-intensity, high-risk operational environments. *Vikalpa: The Journal for Decision Makers*, 39(1). <https://doi.org/10.1177/0256090920140302>
- Barfod, J. R., & Clifton, J. (2025). Is transformational military leadership out there? An exploratory research study of military teams in action. *Armed Forces & Society*. <https://doi.org/10.1177/0095327X241309327>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Cheyre, J. E. (2013). Defence diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur (Eds.), *The Oxford handbook of modern diplomacy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0021>
- Costa, G. Da. (2024). Indonesia, Papua New Guinea strengthen defense ties with training, border security initiatives. *Indo-Pacific Defense FORUM*.



<https://ipdefenseforum.com/2024/08/indonesia-papua-new-guinea-strengthen-defense-ties-with-training-border-security-initiatives/>

Cottey, A., Edmunds, T., & Forster, A. (2002). The second generation problematic: Rethinking democracy and civil-military relations. *Armed Forces & Society*, 29(1), 31–56. <https://doi.org/10.1177/0095327X0202900103>

Cottey, A., & Forster, A. (2004). Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance (Adelphi Paper No. 365). Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies. <https://doi.org/10.1080/714027950>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (16th ed.). Pearson.

Eid, J., Johnsen, B. H., Brun, W., Laberg, J. C., Nyhus, J. K., & Larsson, G. (2004). Situation awareness and transformational leadership in senior military leaders: An exploratory study. *Military Psychology*, 16(3), 203–209. https://doi.org/10.1207/s15327876mp1603_4

García-Guiu, C., Moya, M., Molero, F., & Moriano, J. A. (2016). Transformational leadership and group potency in small military units: The mediating role of group identification and cohesion. *Frontiers in Psychology*, 7, 1491.

Griffith, J. (2006). What do the soldiers say? Needed ingredients for determining unit readiness. *Armed Forces & Society*, 32(3), 367–388. <https://doi.org/10.1177/0095327X05280555>

Gunawan, B., Nurisnaeny, P. S., Kaprisma, H., & Ratmono, B. M. (2024). Border security in intelligence perspective: A bibliometric analysis (1985–2022). *Proceedings of the International Seminar on Border Region (INTSOB 2023)*, 28–38. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-208-8_6

Halkis, M. (2022). *Filsafat ilmu pertahanan: Suatu pengantar*. Unhan Press.



- Harefa, F., & Supriyadi, A. A. (2025). Leadership strategies for enhancing border security in Papua: A collaborative approach to surveillance and threat management. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61511/napbres.v2i1.2025.1731>
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). *Management of organizational behavior: Utilizing human resources* (5th ed.). Prentice Hall.
- Korwa, J., & Rumabar, B. (2024). Challenges ahead for Indonesia-PNG cross-border cooperation. *Devpolicy Blog*, Development Policy Centre. <https://devpolicy.org/challenges-ahead-for-indonesia-png-cross-border-cooperation-20240918/>
- Mahroza, S., Priyanto, & Halkis, M. (2022). Asymmetric diplomacy and securitization in the South China Sea. *Andalas Journal of International Studies*, 11(1), 94–107. <https://doi.org/10.25077/ajis.11.1.94-107.2022>
- Metherall, N., De Fretes, D. R., Mandibondibo, F., & Caucau, T. (2022). Assessing the development impact of the Sota border post connecting Indonesia and Papua New Guinea. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2209>
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). *Strategy safari: Your complete guide through the wilds of strategic management* (2nd ed.). FT Prentice Hall.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). SAGE Publications.
- Praditya, E., Maarif, S., Ali, Y., Saragih, H. J. R., Duarte, R., Suprpto, F. A., & Nugroho, R. (2023). National cybersecurity policy analysis for effective decision-making in the age of artificial intelligence. *Journal of Human Security*, 19(2), 91–106.
- Pugu, M. R., & Pusung, M. (2025). Socio-economic dynamics at the border: A case study of the Sota, Merauke cross-border post and its implications for cooperation with Papua New Guinea. *Journal of Social Research*, 4(10), 2637–2647. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i9.2782>



- Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2019). Pembangunan infrastruktur di perbatasan Papua: Upaya menjamin human security dan melawan perdagangan illegal lintas batas. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 76–92.
- Putri, D. A. K., & Maksum, A. (2026). Cybersecurity vulnerabilities at the Indonesia–Papua New Guinea border: Securitization asymmetry, institutional gaps, and diplomatic escalation. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 6(1), 43–67. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v6i1.5041>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Sumadinata, R. W. S., Achmad, W., & Riyadi, S. F. (2022). Indonesian border defense policy: A case study on the interoperability of the joint regional defense command. *Central European Management Journal*, 30, 886–895.
- Vun, S., Susanto, R., & Halkis, M. (2024). Pol Pot's military strategy: A study on Khmer Rouge guerrilla tactics and territorial defense. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 10(1), 87–88.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.
- Zaccaro, S. J., Gualtieri, J., & Minionis, D. (1995). Task cohesion as a facilitator of team decision making under temporal urgency. *Military Psychology*, 7(2), 77–93.